

TAJUK RENCANA

Tak Ingin Liburan di Jalan

HARI-HARI ini bisa dikatakan sebagai puncak kemacetan di sejumlah ruas jalan di Kota Yogyakarta dan sekitar. Hal ini berkenaan dengan banjirnya kendaraan dari luar DIY bersamaan dengan masa liburan Natal dan Tahun Baru. Bahkan kemacetan, khususnya di sekitar *traffic light* sudah terasa sejak beberapa hari lalu dan diperkirakan akan berlangsung sampai datangnya tahun baru.

Banyaknya wisatawan ini memang harus disyukuri, sebab mempunyai *multiplier efek* besar terhadap perekonomian di daerah ini, apalagi bagi pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan dunia pariwisata. Harapannya, para pelaku wisata, mulai jasa wisata, akomodasi sampai usaha kuliner, mendapat banyak berkah dengan kehadiran wisatawan. Apalagi sudah diprediksi, wisatawan yang akan berlibur di DIY mencapai sekitar 9,4 juta orang. Artinya, kalau satu wisatawan membelanjakan Rp 100.000, misalnya, maka akan masuk uang Rp 940.000.000.000. Padahal setiap satu wisatawan biasanya membelanjakan uang lebih dari Rp 100.000. Jadi, uang yang masuk dipastikan lebih banyak lagi.

Menurut data Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, pada November lalu, rata-rata pengeluaran wisatawan mencapai Rp 2.213.453 per orang dan lama tinggal wisatawan (*length of stay*) 1,77 hari. Sedangkan untuk Desember lama tinggal wisatawan diharapkan meningkat menjadi 1,8 hari. Dengan demikian uang para wisatawan memberi kontribusi ekonomi yang signifikan.

Memang ada pengaruh dari banyaknya kendaraan yang masuk DIY, salah satunya kemacetan di jalan. Sehingga ketika warga DIY akan melakukan bepergian, bisa jadi akan terganggu. Namun hal ini harus dimaklumi. Sebab tidak berlangsung setiap hari, hanya pada masa-masa liburan. Artinya, warga Jogja harus engalahi terlebih dahulu, misalnya dengan menggunakan jalan lain atau tidak menggunakan mobil terlebih dahulu, melainkan dengan motor roda 2, sehingga bisa lincah menerobos kemacetan jalan atau menempuh jalan al-

tematif.

Namun bagi aparat berwajib, khususnya yang berwenang mengatur arus lalu lintas, kenyataan ini jangan hanya dimaklumi, tetapi harus dicari-cari solusi. Jangan sampai ada pembiaran di jalan-jalan yang biasa terjadi kemacetan. Selain itu juga bisa belajar dari masa-masa liburan waktu-waktu sebelumnya, khususnya di titik-titik jalan yang biasa terjadi kemacetan. Harapannya, sudah ada solusi mengatasi kemacetan di jalan-jalan tertentu. Untuk itu perlu ada rekayasa arus lalu lintas atau langkah-langkah lain sehingga tidak ada kemacetan panjang dan lama.

Berdasar pengalaman tahun-tahun lalu, di sekitar *traffic light* atau jalan-jalan menuju objek wisata biasa terjadi kemacetan panjang dan lama. Pasti keadaan ini tidak diinginkan siapa saja, terutama para wisatawan. Sebab mereka inginnya berwisata di objek wisata, buka di tengah kemacetan jalan. Jangan sampai waktu mereka habis di jalan karena terjebak kemacetan. Waktu itu sampai muncul seloroh dari wisatawan bahwa umurnya berkurang karena kendaraannya cukup lama di tengah kemacetan. Semoga semacam ini sudah tidak terjadi lagi.

Selain terkait kelancaran arus lalu lintas, yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah perlakuan atau layanan kepada para wisatawan, khususnya dari para stakeholder di bidang kepariwisataan. Artinya, mereka harus bisa memberikan layanan terbaik kepada para wisatawan sehingga mereka nantinya akan kembali lagi ke Jogja dan jangan sampai membuat kecewa yang bisa merusak citra wisata. Antara lain jangan sampai *nuthuk* wisatawan alias menaikkan harga atau tarif karena mumpun dengan tarif biasa saja, baik harga kuliner, suvenir, parkir atau jasa. Dengan tarif biasa saja pasti beruntung kalau omsetnya banyak.

Semoga dampak kedatangan para wisatawan bisa dinikmati banyak orang. Untuk saat ini maupun di masa-masa mendatang. (*)-d

Krisis Rasa Malu dan Bersalah

KRISIS rasa malu dan bersalah kian tampak jelas kita alami sebagai bangsa. Hampir semua lapisan masyarakat mengalami krisis rasa malu dan bersalah, mulai dari (oknum) pejabat, selebritas, akademisi, atlet, hingga warga biasa. Yang dahulu dianggap salah dan memalukan, kini dilakukan terang-terangan. Apa yang kemudian perlu kita benahi bersama?

Hati kita terusik kala membaca berita terkini terkait gelar abal-abal sejumlah guru besar. Sosok guru sebagai yang bisa *digugu* (dipercayai) dan ditiru seolah memudar.

Celakanya, segelintir elite politik turut membikin onar dengan mencari gelar akademik tertinggi tanpa mengikuti prosedur. Gelar *honoris causa* yang seharusnya merupakan kehormatan (*honour*) malah menjadi komoditi politik dagang sapi.

Krisis rasa malu juga terjadi dalam dunia peradilan. Baru-baru ini kita kembali dikejutkan dengan terbongkarnya mafia jual-beli kasus oleh oknum mantan pejabat Mahkamah Agung. Tak tanggung-tanggung, nilai suap mencapai hampir satu triliun.

Tentu saja kasus ini hanyalah puncak dari gunung es megakorupsi yang terus mendera negeri kita. Presiden Prabowo dalam pidato perdana (20/10) mengatakan, ia akan mewaspadai terjadinya kebocoran anggaran. Ini suatu hal yang patut kita apresiasi.

Rasa Malu dan Bersalah Memiliki rasa malu (*shame*) dan bersalah (*guilt*) yang wajar adalah tanda pribadi yang sehat. Ditilik dari asal katanya, *guilt* (rasa bersalah) berasal dari kata bahasa Jerman *geld* yang berarti uang atau utang.

Rasa bersalah merujuk pada rasa sesal karena telah membuat kerugian sehingga perlu membayar ganti rugi atau membenahi diri. Rasa bersalah bahkan mendorong orang untuk meminta dan menerima hukuman yang wajar (Clark, 2012).

Kita perlu belajar dari masyarakat Jepang yang memiliki rasa malu yang konstruktif. Kita sering mendengar, pejabat Jepang mengundurkan diri dan meminta maaf secara tulus ketika membuat kesalahan. Hal ini berakar

Bobby Steven

pada etika bushido yang diyakini para ksatria dan bangsawan Jepang mencakup sikap adil, berani, budiman, sopan, jujur, setia, dan tahu malu (Nitobe, 2019).

Etika bushido berakar pada ajaran agama Buddha, Shinto, dan Konfusius. Seorang Jepang merasa malu ketika menyadari tindakannya tidak sesuai standar etika masyarakat yang menjunjung keluhuran pekerti (Sakuta, 1964).



KR-JOKO SANTOSO

Sebenarnya, konsep rasa malu dan bersalah yang proporsional juga menjadi nilai inti kebudayaan Nusantara. Umpama, dalam budaya Jawa ada ungkapan *sing sapa rasa risi*. Artinya, barang siapa merasa bersalah, tidak enaluk perasaan. Ia selalu dihantui rasa *wedi isin* atau takut malu di hadapan orang lain. Ia takut tingkahnya menjadi bahan gunjingan banyak orang (Hardjowirogo, 1983).

Masalahnya, apakah keluhuran budi pekerti takut malu saat melanggar norma itu masih kita hayati dan teruskan pada generasi muda kiwari? Yang sering terjadi, kita justru menormalisasi kesalahan dan skandal sebagai sesuatu yang wajar dan patut dimaklumi.

Pendidikan Budi Pekerti

Pendidikan budi pekerti menjadi sangat mendesak guna menanggapi kri-

sis rasa malu dan bersalah yang menggerogoti bangsa kita saat ini. Sayang sekali, selama ini kita cenderung melupakan pentingnya pendidikan budi pekerti. Padahal, kita memiliki warisan istimewa dari para guru bangsa.

Ki Hadjar Dewantara (1889-1959) memberi dasar-dasar pendidikan budi pekerti ala Taman Siswa dalam konsep *among, pamong, dan ngemong*. Pendidikan dijalankan bukan sebagai transfer ilmu belaka, melainkan sebagai proses pembinaan karakter siswa (*among*) oleh pendidik (*pamong*) yang memiliki semangat disiplin penuh cinta (*ngemong*).

Hasil yang diharapkan bukan semata nilai akademik tinggi, melainkan juga insan cendekia berhati mulia. Insan mulia akan dengan *legawa* mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atasnya.

Selain pendidikan budi pekerti, kita juga perlu menegakkan kembali aturan hukum dan wibawa lembaga-lembaga negara. Meski tak luput dari kritik, kabinet baru yang juga diperkuat para tokoh yang kompeten menawarkan harapan.

Sudah cukuplah politik *cawe-cawe*. Biarlah setiap insan dan lembaga bekerja sesuai koridornya. Jika benar, katakan benar. Jika salah, katakan salah. Berbanggalah saat berprestasi. Merasa bersalahlah ketika keliru. (*)-d

*)Dr Bobby Steven, Dosen
Fakultas Teologi Universitas Sanata
Dharma.

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)
No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta,
Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wono (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemardi M Wono (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) Komisaris Utama: Imam Satriyadi, SH.

Komisaris: Mohammad Wirmon Samawi, SE., MIB.

Direktur Utama: Drs. H.Mohammad Idham Samawi.

Direktur Keuangan: Yuriana Nugroho Samawi, SE., MM., MSc.

Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE.

Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo S.Sos.

Direktur Litbang, Pengawasan & Bisnis: Yoeke Indra Agung Laksana, SE

Direktur Umum: Ir. Dyah Sardjuningrum Sitawati.

Pemimpin Umum: Drs. H. Mohammad Idham Samawi. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dr Drs H Octo Lampito MPd. Wakil Pemimpin Redaksi: Drs H Ahmad Luthfie MA. Dr Ronny Sugiantoro, MM,CHE. Redaktur Pelaksana: Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. Manajer Produksi Redaksi: Ngabdul Wakid. Redaktur: Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi S.Sos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari S.Sos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Latief Noor Rochmans. Fotografer: Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. Grafis : Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. Sekretaris Redaksi: Dra Hj Supriyanti.

Kepala TU Langganan: Drs Asri Salman, Telp (0274) - 565685 (Hunting)
Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklandaryk23@yahoo.com, iklandaryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris). Rp 12.000,00/baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jatis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. Alamat e-mail: naskahkr@gmail.com. Radio : KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro: Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. Kuasa Direksi: Ir Ita Indirani.

Wartawan : H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang : Jalan Lempersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPD, Wakil : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP.

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -
Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.

Munuju Beragama Maslahah

MEMBACA Outlook 2025 Kementerian Agama yang mengusung tema Mewujudkan Daya Saing Umat untuk Kemaslahatan Masa Depan, sangat berbeda dengan *baseline* yang digunakan tahun 2024 yang berfokus pada moderasi beragama. Kerangka *Outlook 2025* Kementerian agama menjadikan 8 Astacita Presiden, 17 program prioritas dan 8 program hasil Terbaik Cepat menjadi ide besar dan basis perumusan kerangka *oulook 2025*.

Baseline Kementerian Agama dalam kabinet Merah Putih, sebagaimana dalam kerangka *oulook 2025* di bab 3, pemerintah akan merumuskan langkah langkah menuju Beragama Maslahah. Beragama maslahah akan menjadi *branding* baru tata kelola relasi agama dan negara pemerintahan era Prabowo Subianto. Dalam relasi agama dengan negara pemerintah mengambil perspektif bahwa agama itu sumber isolusii yang dapat menghadirkan banyak manfaat dan maslahah bagi kemajuan dan kesejahteraan umat.

Prinsip Beragama Maslahah

Beragama adalah suatu bentuk pengalaman keyakinan yang menghubungkan manusia dengan Tuhan. Namun, beragama tidak hanya tentang hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan, tetapi juga horizontal, yaitu hubungan dengan sesama manusia dan alam semesta. Beragama maslahah mengarahkan umat beragama untuk tidak hanya menjalankan ritual atau ibadah individual, tetapi juga menjalankan ibadah sosial.

Seorang muslim yang berdzikir, melaksanakan puasa, dan mendirikan salat pada hakikatnya adalah untuk kebaikan diri sendiri. Dengan berzikir, hati menjadi lebih tenang. Dengan salat, bisa mencegah dari perbuatan keji dan *munkar*. Dengan menjalankan ibadah puasa, bisa merasakan bagaimana merasakan lapar sehingga tumbuh sikap empati kepada orang lain. Demikian seterusnya, semua ajaran agama adalah untuk ke-

Mucharom

baikan dan kemaslahatan bersama. Tidak ada agama yang mengajarkan umatnya untuk melakukan tindak kejahatan, berbuat curang, korupsi, mengambil hak orang lain, termasuk merusak alam semesta. Semua agama mengajarkan untuk hidup damai, berbagi kasih dan kemaslahatan meskipun berbeda agama dan keyakinan.

Tawaran Solusi

Praktik beragama maslahah sebagaimana dijelaskan di atas, menjadi bukti nyata bahwa agama bisa menjadi *problem solver* berbagai persoalan individu, sosial dan bahkan negara. Karena itu, beragama maslahah menjadi penting untuk didakwahkan agar menjadi *mainstream* cara beragama yang berdampak. Dampak nyatanya adalah terbangunnya kesholihan pribadi sekaligus kesholihan sosial dan memberi kontribusi positif bagi tegaknya persatuan dan kesatuan bangsa.

Adalah Aji Sofanudin peneliti BRIN lewat bukunya Inovasi dan Beragama Maslahat: Menuju Indonesia Emas 2045 (2024) selain berisi kajian relasi agama dengan negara, Aji menawarkan perlunya inovasi beragama untuk mewujudkan beragama maslahah. Solusi inovasi beragama yang dimaksud adalah kebaruan dalam pemikiran dan praktik beragama yang bertujuan untuk kemaslahatan. Pilihan perlunya inovasi beragama pada aspek ibadah yang *ghoiru mahdhoh* adalah keniscayaan yang mesti diarusutamakan. Pada titik inilah agama benar-benar dapat sebagai solusi atas berbagai problem kemanusiaan. Beragama maslahah adalah praktik riil hadis Nabi SAW, sebaik - baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain.

Secara praktis, inovasi beragama sudah dipraktikkan di masyarakat dalam bentuk pengamalan beragama. Praktik inovasi beragama setidaknya ada pada manajemen pengelolaan masjid, pengelolaan pendidikan Islam, pengelolaan haji dan umrah, inovasi layanan Kantor Urusan Agama (KUA) dan pengelolaan dana filantropi ; zakat, infaq, shodaqoh, hibah, wakaf. Secara faktual, di sekitar kita sudah banyak praktik baik dalam digitalisasi tata kelola keagamaan.

Beragama maslahat itu melihat agama sebagai sesuatu yang positif, *problem solver*, dan spirit kemajuan bangsa. Beragama maslahah adalah beragama yang selaras dengan konsensus berbangsa: Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Agama menjadi solusi atas berbagai persoalan bangsa, bukan sebaliknya. Beragama maslahah melihat agama sebagai sesuatu yang positif, agama menjadi sumber solusi atas berbagai persoalan bangsa, bukan sebaliknya. Lawan dari beragama *maslahah* adalah beragama *mafsadah* (beragama yang mendatangkan kerusakan). (*)-d

*)Mucharom SAG MSI, Kepala
MAN 4 Bantul.

Pojok KR

Waspada gelombang tinggi pantai selatan.
- Patuhi aturan yang dibuat Tim SAR.

BNPB pantau daerah rawan bencana.
-Sewaktu-waktu terjadi peristiwa lang-sung tangani.

Ampuni koruptor bisa via denda damai.
- Biar kapok, harus denda tinggi.

Beraba